AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i1.8994

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI NAGARI KAMANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Community Participation in Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) in Nagari Kamang, Sijunjung Regency

Rinita & Yuliarti
Universitas Negeri Padang
rinitahalawa@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 23, 2025	Jan 14, 2026	Dec 27, 2026	Feb 1, 2026

Abstract

Community participation is a key element in participatory development planning at the nagari (village) level, and the *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (*Musrenbang*) serves as a strategic forum for channeling citizens' aspirations in the formulation of development programs. However, attendance and engagement levels among community members in the *Musrenbang* of Kamang Nagari, Sijunjung Regency, have shown a declining trend. This study aims to describe the level of community participation in the implementation of *Musrenbang* and to analyze the factors that influence such participation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and document studies involving key informants consisting of the wali nagari, nagari officials, community leaders, and community members who participated and did not participate in *Musrenbang*. The findings indicate that community participation in the *Musrenbang* of Kamang Nagari remains relatively low at all stages, including attendance, expression of aspirations, and involvement in decision-making. This low participation is influenced by several key factors, namely limited nagari

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

budgets, the dominance of government actors in the *Musrenbang* forum, low public trust in the follow-up of *Musrenbang* outcomes, and limited community understanding of the importance of participatory development planning. The study underscores the need to enhance budget transparency, strengthen community roles and capacities, and optimize the socialization of *Musrenbang* as practical implications for improving the quality of community participation in development planning at the nagari level.

Keywords: Community Participation; *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Musrenbang); Participatory Development Planning; Kamang Nagari; Village Governance

Abstrak: Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat nagari, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan. Namun, tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung menunjukkan kecenderungan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri atas wali nagari, perangkat nagari, tokoh masyarakat, serta masyarakat peserta dan nonpeserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang masih tergolong rendah, baik pada tahap kehadiran, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan anggaran nagari, dominasi aktor pemerintah dalam forum Musrenbang, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tindak lanjut hasil Musrenbang, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pembangunan partisipatif. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi anggaran, penguatan peran dan kapasitas masyarakat, serta optimalisasi sosialisasi Musrenbang sebagai implikasi praktis untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat nagari.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Perencanaan Pembangunan Partisipatif; Nagari Kamang; Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diposisikan sebagai forum partisipatif yang bertujuan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan (Hadawiya et al., 2021). Melalui Musrenbang, masyarakat diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan nagari.

Di Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung, pelaksanaan Musrenbang secara prosedural telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun, data kehadiran Musrenbang menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta dari tahun ke tahun, khususnya dari unsur masyarakat dan tokoh lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang belum berjalan secara optimal.

Rendahnya tingkat partisipasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat bahwa aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang sering kali tidak terealisasi (Uceng et al., 2019). Salah satu contoh yang sering muncul adalah usulan pembangunan infrastruktur penting, seperti jembatan penghubung antar jorong, yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran nagari. Situasi ini menimbulkan kekecewaan dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap forum Musrenbang, sehingga memengaruhi minat masyarakat untuk kembali berpartisipasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah nagari dalam memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat di Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung sebagaimana terjadi secara alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang muncul dari keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbang, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2021), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi

objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam proses Musrenbang di Nagari Kamang. Informan tersebut meliputi wali nagari, sekretaris nagari, tokoh masyarakat, masyarakat yang pernah mengikuti Musrenbang, serta masyarakat yang tidak lagi berpartisipasi dalam Musrenbang. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari 11 November 2025 hingga 27 Januari 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap pelaksanaan Musrenbang, serta studi dokumentasi berupa notulen rapat, daftar hadir, dan dokumen perencanaan nagari. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kredibilitas data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Musrenbang di Nagari Kamang dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP). Untuk penyusunan RKP Tahun 2025, Musrenbang telah dilaksanakan pada Oktober 2024 dan diikuti oleh perwakilan pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya muncul persoalan krusial berupa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut. Rendahnya partisipasi ini terjadi karena sebagian besar usulan masyarakat pada Musrenbang sebelumnya tidak dapat direalisasikan, terutama akibat keterbatasan anggaran nagari. Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Kamang, Bapak Mardalius, menjelaskan bahwa:

"… tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut saya situasi ini terjadi karena sebagian besar usulan masyarakat tidak dapat direalisasikan, terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran nagari. Sebagai contoh bahwa pada tahun sebelumnya masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan yang dinilai sangat penting untuk aktivitas ekonomi dan akses antar jorong, tapi usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya dana yang cukup. Keadaan itulah yang membuat masyarakat kecewa, sehingga mereka merasa kalau aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang tidak memberikan hasil yang nyata. Jadi pada Musrenbang tahun berikutnya

banyak masyarakat tidak mau datang karena mereka beranggapan bahwa usulan mereka hanya dicatat tanpa ada tindak lanjut nyata dari pemerintah nagari."

Secara kelembagaan, tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang Nagari dapat langsung direalisasikan karena harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran nagari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan nagari berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa/Nagari, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan pemerintah daerah, serta pendapatan asli nagari yang jumlahnya relatif terbatas. Usulan masyarakat yang dihimpun dalam Musrenbang selanjutnya diseleksi dan diprioritaskan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kondisi keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran, terutama usulan yang membutuhkan biaya besar seperti pembangunan infrastruktur jembatan, sehingga sebagian usulan harus ditunda atau dialihkan ke tingkat perencanaan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara tidak terealisasinya usulan masyarakat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas Musrenbang sebagai instrumen perencanaan partisipatif. Ketika usulan masyarakat tidak ditindaklanjuti, maka muncul persepsi negatif terhadap manfaat Musrenbang, yang pada akhirnya menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Fenomena ini sejalan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti tingkat pendidikan, usia, pendapatan, pengalaman buruk, serta persepsi terhadap manfaat program. Kekecewaan terhadap tidak terealisasinya usulan tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat semakin menurun, yang tercermin dari data kehadiran peserta Musrenbang Nagari Kamang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Undangan Rapat Musrenbang Nagari Kamang Tahun 2024

No.	Jabatan/Instansi	Keterangan
1.	OPD Kabupaten Sijunjung	Hadir sebagai perwakilan Pemerintah Daerah
2.	Camat Kamang Baru	Pembina wilayah kecamatan
3.	Forkopimcam Kamang Baru	Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

No.	Jabatan/Instansi	Keterangan
4.	PD dan PLD Nagari Kamang	Pendamping Desa/Nagari
5.	Ketua Lembaga Nagari Kamang	Unsur lembaga kemasyarakatan
6.	Kepala Sekolah se-Nagari Kamang	Perwakilan sektor pendidikan
7.	Anggota BPN	Badan Permusyawaratan Nagari
8.	Anggota LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
9.	Perangkat Nagari	Struktur pelaksana pemerintahan nagari
10.	PKK Jorong se-Nagari Kamang	Perwakilan organisasi perempuan
11.	Ketua Pemuda Jorong se-Nagari Kamang	Unsur organisasi kepemudaan
12.	Kader (1 orang per jorong)	Perwakilan kader masyarakat

Sumber: Notulen Rapat Musrenbang Nagari Kamang, 2024

Jumlah undangan : 100 orang

Materi : Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, jumlah undangan Musrenbang Nagari Kamang Tahun 2024 tercatat sebanyak 100 peserta. Undangan tersebut mencakup berbagai unsur pemangku kepentingan, baik formal maupun informal, yang secara struktur memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan. Komposisi undangan menunjukkan bahwa Musrenbang telah dirancang dengan pendekatan multistakeholder, sesuai mekanisme Musrenbang yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu melibatkan pemerintah nagari, perangkat daerah tingkat kabupaten, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, serta unsur perempuan dan pemuda. Dengan demikian, Tabel 1. memperkuat bukti bahwa secara prosedural, Musrenbang telah dirancang berjalan sesuai aturan partisipatif. Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah apakah representasi undangan tersebut benar-benar hadir dan memberikan kontribusi dalam proses perencanaan. Hal ini terlihat lebih jelas pada tabel selanjutnya.

Tabel 2. Perbandingan Peserta Kehadiran Musrenbang Nagari Kamang Tahun 2023 dan 2024

No.	Kategori Peserta	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
1.	Forkopincam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan)	2	2
2.	Camat	1	1

No.	Kategori Peserta	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)
3.	Ketua Lembaga	5	3
4.	Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)	7	5
5.	Pemerintah Nagari	20	16
6.	Tokoh Masyarakat	10	6
7.	PKK Nagari	1	1
8.	PKK Jorong	9	6
Total		55	40

Sumber: Notulen Rapat Musrenbang Nagari Kamang Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan Tabel 2, Terlihat adanya penurunan signifikan jumlah peserta Musrenbang Nagari Kamang dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat realisasi usulan masyarakat, maka semakin rendah pula kehadiran dan keterlibatan mereka dalam Musrenbang. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka Musrenbang berpotensi kehilangan fungsi strategisnya sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif. Akibatnya, kebijakan dan program pembangunan nagari yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga tujuan pembangunan nagari sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah nagari untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui peningkatan transparansi, kejelasan tindak lanjut usulan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat nagari. Musrenbang idealnya menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, hasil penelitian di Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang inklusif dan bermakna. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat serta minimnya keterlibatan aktif

dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian (Desriadi, 2018) dan (Hakim, 2017) yang menyatakan bahwa Musrenbang di tingkat desa sering kali masih bersifat formalitas administratif. Dengan demikian, Musrenbang di Nagari Kamang belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen demokrasi partisipatif. Hal ini berdampak langsung pada kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan.

Berdasarkan data kehadiran peserta Musrenbang tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya penurunan jumlah peserta dari 55 orang menjadi 40 orang. Penurunan ini terutama terjadi pada unsur tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Nagari, serta PKK Jorong, yang sejatinya memiliki peran strategis dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat. Sementara itu, kehadiran unsur pemerintahan relatif stabil, yang menunjukkan bahwa Musrenbang masih didominasi oleh aktor formal pemerintahan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi antar unsur yang terlibat. Menurut (Poespitohadi, 2023), dominasi pemerintah dalam Musrenbang dapat mengurangi ruang partisipasi masyarakat dan melemahkan substansi perencanaan partisipatif. Kehadiran yang rendah juga mencerminkan menurunnya minat dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan (Darin et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Musrenbang belum dipersepsikan sebagai forum yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Selain rendahnya tingkat kehadiran, kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang juga cenderung pasif. Sebagian besar peserta hanya hadir sebagai pendengar tanpa menyampaikan usulan atau terlibat dalam diskusi secara aktif. Diskusi Musrenbang lebih banyak didominasi oleh perangkat nagari dan lembaga formal, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat simbolik. Menurut (A et al., 2025), partisipasi yang bersifat pasif menyebabkan Musrenbang kehilangan esensi sebagai forum perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga memperkuat kesan bahwa Musrenbang hanya bersifat prosedural. Akibatnya, hasil perencanaan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori partisipasi menurut T. Ndraha dalam (Handrina et al., 2023), bahwa partisipasi masyarakat di Nagari Kamang lebih banyak terjadi pada jenjang kehadiran formal. Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan masih sangat terbatas, karena masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan prioritas program

pembangunan. Pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, keterlibatan masyarakat juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usulan yang tidak terealisasi akibat keterbatasan anggaran nagari. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat hampir tidak dilibatkan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada kategori partisipasi semu atau *pseudo participation*. Hal ini sejalan dengan temuan (Alyas et al., 2025) yang menyatakan bahwa partisipasi semu masih menjadi persoalan utama dalam Musrenbang desa.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang adalah keterbatasan anggaran nagari. Berdasarkan hasil wawancara, banyak usulan masyarakat yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan dana. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa Musrenbang tidak memberikan dampak nyata terhadap pembangunan. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis dan enggan untuk berpartisipasi pada Musrenbang berikutnya. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian (Fakhira & Salam, 2023) yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara usulan dan realisasi program dapat menurunkan partisipasi masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan struktural dalam perencanaan pembangunan nagari. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan komunikasi yang lebih baik terkait kondisi anggaran.

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah nagari. Masyarakat merasa bahwa aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang tidak ditindaklanjuti secara serius. Rendahnya kepercayaan ini sejalan dengan konsep *political trust* yang dikemukakan oleh (Levi & Stoker, 2025), di mana kepercayaan publik sangat memengaruhi partisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Fukuyama dalam (Ubaidillah, 2017) juga menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang penting dalam pembangunan. Ketika kepercayaan masyarakat rendah, partisipasi cenderung menurun. Kondisi ini diperparah oleh minimnya umpan balik dari pemerintah nagari terkait hasil Musrenbang. Akibatnya, masyarakat merasa tidak memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan pentingnya Musrenbang juga menjadi faktor penghambat partisipasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah nagari belum optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat tidak memahami bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan nagari. Menurut (Fajrillah, 2025), sosialisasi yang efektif,

termasuk melalui media sosial, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung memandang Musrenbang sebagai agenda rutin pemerintah semata. Hal ini menyebabkan rendahnya antusiasme dan keterlibatan masyarakat. Maka dari itu, peningkatan literasi partisipasi menjadi kebutuhan penting dalam konteks ini.

Dominasi aktor pemerintah dalam Musrenbang juga menjadi faktor yang membatasi ruang partisipasi masyarakat. Struktur forum yang lebih menekankan pada penyampaian program pemerintah dibandingkan dialog dua arah menyebabkan masyarakat merasa kurang diberdayakan. Menurut (Putnam, n.d.), partisipasi yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika ruang dialog terbatas, partisipasi menjadi tidak bermakna. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip perencanaan pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga itu, diperlukan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan Musrenbang. Pendekatan yang lebih dialogis dan inklusif diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berdampak langsung pada kualitas perencanaan pembangunan nagari. Program pembangunan yang dirumuskan cenderung mencerminkan perspektif pemerintah dibandingkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara program dan kondisi lapangan. Menurut (Wudianto & Setiawan, 2024), perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif cenderung kurang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, rendahnya partisipasi juga dapat melemahkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan. Akibatnya, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan.

Implikasi lain dari rendahnya partisipasi adalah melemahnya fungsi Musrenbang sebagai sarana pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat. Musrenbang seharusnya menjadi wadah pembelajaran demokrasi di tingkat lokal. Namun, ketika partisipasi masyarakat rendah, fungsi edukatif ini tidak berjalan optimal. Menurut (Setiadi & Pradana, 2022), partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua aspek yang saling terkait dalam sektor publik. Tanpa partisipasi yang aktif, pemberdayaan masyarakat sulit terwujud. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengawal pembangunan. Oleh

karena itu, penguatan partisipasi masyarakat menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola nagari.

Secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Rendahnya kehadiran, partisipasi pasif, keterbatasan anggaran, rendahnya kepercayaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah nagari untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Upaya tersebut meliputi peningkatan transparansi anggaran, penguatan sosialisasi, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Musrenbang diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif yang demokratis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung masih tergolong rendah, baik dari segi kehadiran maupun keterlibatan aktif dalam proses perencanaan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan anggaran nagari, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Musrenbang, dominasi aktor pemerintah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat agar Musrenbang dapat berfungsi secara optimal sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam kajian perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat nagari. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dengan menghadirkan analisis empiris yang dikaitkan dengan teori partisipasi Ndraha, khususnya dalam konteks pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya terkait fenomena partisipasi semu dalam perencanaan pembangunan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah nagari dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang,

terutama dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dengan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya melalui metode kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur tingkat partisipasi secara lebih objektif dan terukur. 2) Memperluas fokus kajian pada aspek kepercayaan publik (public trust), transparansi anggaran, serta peran modal sosial dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3) Melakukan penelitian komparatif antar nagari atau desa juga perlu dilakukan untuk melihat perbedaan pola dan faktor partisipasi masyarakat dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan nagari yang partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A, M. A. R., Nurwanda, A., & Nursetiawan, I. (2025). Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *Journal Sains Student Research, 3*(5), 741–756. https://ejournal.literasisains.id/index.php/jssr/article/view/5736

Alyas, A. P., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2025). Strategi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Botto Mallangga Kabupaten Enrekang. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 8*(2), 491–503. https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/6516

Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, 15*(1), 11–21. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/view/15599

Desriadi, D. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika, 2*(1), 63–85. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1240

Fajrillah, C. (2025). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan melalui Sosialisasi Media Sosial. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik), 5*(1), 30–39. https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jisp/article/view/299

Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *PENTAHELIX, 1*(2), 143–154. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/pentahelix/article/view/18990

Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3*(2), 192–200. https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/749

Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana, 2*(2), 43–53. https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963

Handrina, E., & Gusnayetti, G. (2023). Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan UKM Ekonomi Masyarakat dan Dampak Sosiologis (Studi Kec. Kamang Magek, Kab Agam). *UNES Law Review, 5*(4), 1756–1771. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/505 [Access restricted]

Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science, 3*(1), 475–507. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.3.1.475

Poespitohadi, W. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa. *Media Bina Ilmiah, 18*(1), 43–50. https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/584/388

Putnam, R. D. (n.d.). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika, 10*(3), 881–894. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Ubaidillah, H. (2017). Analisa Pengaruh Modal Sosial terhadap Organizational Citizenship Behaviors (OCB) dengan Mediasi Kepercayaan pada Manajemen. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi, 68*(1), 53–61. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/633

Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5*(2), 18–32. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126

Wudianto, N. R., & Setiawan, T. (2024). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut (Studi tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mekarsari Tahun 2023). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 4*(3), 103–126. https://dinastirev.org/index.php/JIHHP/article/view/1882